

ABSTRACT

The Effect of General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Regional Tax, and Regional Area on Capital Expenditure of Provincial Governments in Indonesia

Saskia Zikri Prawidha

Email: saskiazikri778@gmail.com

This study aims to analyze the effect of General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH), Regional Tax, and Regional Area on capital expenditure of provincial governments in Indonesia. This study employs a quantitative approach using panel data regression analysis. The population consists of all 38 provincial governments in Indonesia, and the sample was selected using purposive sampling, resulting in 34 provinces observed over the period 2020–2024 with a total of 170 observations. The estimation model was selected through a series of specification tests comprising the Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier test, with the Random Effect Model (REM) identified as the best-fit model. Partially, DAU, DBH, and Regional Tax have a significant positive effect on capital expenditure, indicating that increases in intergovernmental transfers and own-source revenue are consistently followed by higher capital spending at the provincial level. In contrast, Regional Area has no significant effect on capital expenditure, suggesting that geographical size alone does not determine the magnitude of infrastructure investment. Simultaneously, DAU, DBH, Regional Tax, and Regional Area together have a significant effect on capital expenditure of provincial governments in Indonesia. These findings imply that fiscal capacity is the primary driver of capital expenditure allocation among Indonesian provincial governments.

Keywords: Agency Theory, Capital Expenditure, Fiscal Decentralization, Fiscal Need Theory, Local Government Finance

ABSTRAK

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia

Saskia Zikri Prawidha

Email: saskiazikri778@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Daerah, dan Luas Wilayah terhadap belanja modal pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Populasi penelitian adalah seluruh 38 pemerintah provinsi di Indonesia, dan sampel dipilih menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh 34 provinsi yang diamati selama periode 2020–2024 dengan total 170 observasi. Model estimasi dipilih melalui serangkaian uji spesifikasi yang meliputi uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*, dengan *Random Effect Model* (REM) sebagai model terbaik. Secara parsial, DAU, DBH, dan Pajak Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, yang menunjukkan bahwa peningkatan transfer antar pemerintah dan pendapatan asli daerah secara konsisten diikuti oleh peningkatan belanja modal di tingkat provinsi. Sebaliknya, Luas Wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang mengindikasikan bahwa ukuran geografis saja tidak menentukan besarnya investasi infrastruktur. Secara simultan, DAU, DBH, Pajak Daerah, dan Luas Wilayah bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah provinsi di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal merupakan faktor utama penggerak alokasi belanja modal di antara pemerintah provinsi di Indonesia.

Kata Kunci: Belanja Modal, Desentralisasi Fiskal, Keuangan Daerah, Teori Kebutuhan Fiskal, Teori Keagenan